



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI SELASA, 5 FEBRUARI 2013



DAFTAR ISI

Pendanaan Proyek Infrastruktur.....	1
Monorail	2
Proyek Bukit Asam	3
Jalan Tol	4
Bandara	5
Infrastruktur Jalan dan Jembaran	6
Ruas Tol Dalam Kota	7



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☒ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pemerintah jajaki Model Pendanaan Baru	<div>- Salah satu cara pendanaan proyek infrastruktur yang tengah dikaji adalah pendanaan hibrida alias hybrid financing dengan metode performance based annuity scheme (PBAS) yang sedikit dimodifikasi.</div> <div>- Saat ini, pemerintah Indonesia sudah menjalankan beberapa skema pembiayaan infrastruktur pemerintah. Pertama pendanaan murni dari APBN tahun berjalan. Kedua adalah menggandeng sektor swasta untuk imbalan konsesi proyek, seperti proyek kelistrikan</div>					

PENDANAAN PROYEK INFRASTRUKTUR

Pemerintah Jajaki Model Pendanaan Baru

JAKARTA. Pemerintah yakin masih banyak sumber pendanaan pelbagai proyek. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji cara pendanaan agar tujuan membangun berbagai proyek infrastruktur bisa tetap tercapai dengan cepat.

Salah satu cara pendanaan proyek infrastruktur yang tengah dikaji adalah pendanaan hibrida alias *hybrid financing* dengan metode *performance based annuity scheme* (PBAS). Metode ini sejatinya bentuk proyek kerjasama antara pemerintah dengan swasta (KPS) yang sedikit dimodifikasi. Kalau dalam KPS murni pemerintah mengeluarkan duit di awal proyek bersama dengan pihak swasta, nah di metode PBAS ini, partisipasi pemerintah dicicil setelah proyek kelar digarap swasta.

Selain itu, pemerintah juga akan membayar ongkos operasional dan pemeliharaan kepada pihak swasta bersamaan dengan cicilan tersebut. Tapi, tarif jasa pengguna infrastruktur tetap menjadi hak pemerintah. "Mekanisme pendanaan ini sedang digodok oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Eko-

Wahyu Utomo, Kepala Divisi Integrasi Program KP3EI.

Wahyu optimistis, cara ini bisa sukses untuk menggarap beberapa proyek infrastruktur pemerintah. Sebab, cara yang sama juga telah diterapkan di India untuk menggarap proyek infrastruktur jalan raya maupun proyek pelabuhan.

Sebagai catatan, cara pendanaan seperti ini akan dilakukan untuk proyek-proyek pemerintah yang memang tidak menarik saat ditawarkan ke swasta. Sebab, secara bisnis, proyek tersebut tidak layak lantaran mendatangkan imbal hasil investasi yang sangat kecil. "Saat membangun proyek tersebut, pihak swasta tetap akan mendapat jaminan bahwa proyek tersebut akan dibayar pemerintah," jelas Wahyu, Senin (4/2).

Tapi Wahyu belum bisa memastikan kapan model pendanaan seperti ini akan dilaksanakan oleh pemerintah. Sebab, saat ini KP3EI baru menyerahkan usulan ini kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa. Kantor Menko akan berdiskusi dengan semua instansi yang terlibat dalam



KOMPAS/P Raditya Mahendra Yasa

Pemerintah juga akan membayar ongkos operasional dan pemeliharaan kepada pihak swasta.

pendapat dari sektor swasta dalam negeri.

Saat ini, pemerintah Indonesia sudah menjalankan beberapa skema pembiayaan infrastruktur pemerintah. Pertama, pendanaan murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan, baik untuk proyek jangka panjang ataupun jangka pendek. Cara kedua adalah menggandeng sektor swasta nasional untuk imbalan konsesi proyek, seperti proyek kelistrikan.

Wahyu optimistis, cara ini lebih efektif untuk merealisasikan proyek. Sebagai contoh, proyek pengerjaan Pelabuhan Kalibaru di Tanjung Priok yang ditugaskan kepada Pelindo II. Ke depan, pemerintah akan menawarkan proyek-proyek infrastruktur yang ada di wilayah Indonesia Timur dengan skema baru ini.



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☒ Feb

☐ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☒ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Patok Rp. 150 M Per Kilometer	<div><div>PT. Melu Bangun Wiweka mengkalim monorel yang mereka usung lebih mudah dari milik pabrikan luar negeri</div><div>Mulai dari pembangunan perlintasan, sampai kepada rancangan model jalan monorel, sebenarnya penekanan biaya itu bisa dlakukan pada pembangunan jalan.</div></div>			Rp. 150M per kilometer	PT. Melu Bangun Wiweka (MBW)	

Patok Rp 150 M Per Kilometer

BEKASI-PT Melu Bangun Wiweka (MBW) mengklaim kalau teknologi monorel yang mereka usung lebih murah dari milik pabrikan luar negeri. Perusahaan yang berlokasi di Jalan Simpangtiga, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ini mematok harga Rp 150 miliar untuk satu kilometer. Padahal, terknologi serupa dari luar negeri bisa berbiaya Rp 350 miliar/kilometer.

Untuk diketahui, PT MBW membuat purwarupa atau prototipe monorel yang mereka berinama E-space Monorail atau kepanjangan dari *environment, safety, performance, appearance, comfort and economics*. Enginer Manager PT MBW, Teguh Nugraha Kusnan mengatakan dengan biaya murah tentu ada hal-hal yang akan dikurangi.

Mulai dari pembangunan perlintasan, sampai kepada rancangan jalan monorel. "Sebenarnya, penekanan biaya itu bisa dilakukan pada pembangunan jalan. Kalau perancangan monorel tidak begitu besar," katanya.

Untuk kualitas monorel sendiri, kata Teguh juga, tidak akan mengurangi meski harganya murah. Apalagi, seluruh komponen mo-



DENYISK/ANDARINOPPOS

NYAMAN: Rancangan bagian dalam E-space Monorail karya PT MBW.

norel dibeli dari beberapa negara. Seperti *electrical* dan *system control* yang masih impor. Dia juga mengatakan, prototipe monorel yang sudah dibuat perusahaannya mampu melaju dengan kecepatan mencapai 80 kilometer/ jam. "Artinya biar harga murah, tetapi bukan murahan," ungkap jebolan S2, RWTH Aachen-Jerman tahun 2005 ini.

Pria yang sudah memiliki dua anak ini juga mengaku, konsep monorel yang dibuatnya bisa dibilang campuran. Dia mengadopsi konsep monorel dari negara-negara yang sudah memi-

liki angkutan masal rel tunggal tersebut. Seperti yang ada di Malaysia dan Jepang. "Jadi kami ambil rancangan terbaik lalu disatukan," ucapnya juga.

Pria yang juga jebolan Fakultas Teknik, Universitas Indonesia angkatan 1994 ini mengaku tidak ada *market* yang akan dia tuju dengan pembuatan prototipe monorel tersebut. Termasuk beberapa proyek monorel yang tengah digagas di beberapa daerah. "Tidak ada yang dituju. Tapi rancangan monorel saya ini tidak kalah *loh* dengan luar negeri," cetusnya juga. (dny)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☒ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya / Nilai Investasi	Pelaku	Keterangan
Proyek Bukit Asam Transpacific berjalan Mulai Semester I-2013	<div>- Proyek Bukit Asam Transpacific Railways (BATR) akhirnya segera terealisasi setelah tertunda dua tahun.</div> <div>- Proyek patungan ini telah mendapat kesepakatan pendanaan dari beberapa kreditur. Seperti, Bank of China, China Development Bank, China Exmi dan IDBC</div>	2013		US\$ 1,8 Miliar		

AKSI KORPORASI EMITEN

Proyek Bukit Asam Transpacific Berjalan Mulai Semester I-2013

JAKARTA. Proyek Bukit Asam Transpacific Railways (BATR) akhirnya segera terealisasi setelah tertunda dua tahun. Kini, proyek itu akan mulai berjalan semester I 2013.

Milawarna, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengatakan, proyek patungan tersebut akan melakukan *financial closing* dengan kreditur April 2013. "Sehingga setelah itu kami bisa melakukan pembebasan lahan dan konstruksi tahap awal di semester I-2013 ini," ujar dia, akhir pekan lalu.

Proyek patungan ini telah mendapatkan kesepakatan pendanaan dari beberapa kreditur. Seperti, Bank of China, China Development Bank, China Exim dan ICBC. Nilainya mencapai US\$ 1,8 miliar.

Valuasi awal proyek BATR US\$ 1,3 miliar. Proyek ini merupakan perusahaan patungan Grup Rajawali dengan PTBA. Porsi PTBA minoritas, yaitu hanya 10%, sedangkan sisanya Rajawali.

PTBA berniat menambah

porasi kepemilikan menjadi 20%. Namun, kata Milawarna, hal itu belum akan dilakukan tahun ini. Ia beralasan, saat ini pihaknya fokus ke realisasi proyek ini. "Yang penting jalan dulu," tutur dia.

Faktor penghambat dari proyek BATR juga adalah proses restrukturisasi PT Bukit Asam Bangko (BAB). BAB

Proyek BATR mendapatkan pendanaan dari beberapa kreditur.

adalah entitas patungan antara PTBA dan Grup Rajawali yang mengurus konsesi batubara di Bangko, Sumatera Selatan. PTBA memegang 65% saham dan sisanya Grup Rajawali. Nilai proyek BAB ini di proyeksi US\$ 700 juta.

Pengembangan konsesi belum bisa dilakukan lantaran

pengalihan izin usaha (IUP). Pemilik awal konsesi di Bangko adalah PTBA. Namun, setelah ada mega proyek patungan ini, pengembangan diserahkan ke BAB.

Pada 2009, keluar UU Nomor 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Beleid menyebutkan, yang berhak melakukan kegiatan usaha penambangan adalah pemilik IUP. Namun, tahun lalu, pemerintah merevisi PP 24/2012 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga PTBA bisa mengalihkan IUP ke BAB.

Milawarna mengaku, saat ini, masih menunggu hasil valuasi konsultan independen. Hal itu untuk mengetahui nilai ekonomi dari konsesi tambang batubara Bangko. Hasilnya akan menjadi rujukan besaran penyertaan modal masing-masing pihak. Valuasi pada tahun 2008 nilainya US\$ 1,21 per ton dengan cadangan batubara 400 juta ton.

Amailla Putri Hasniawati



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☒ Feb

☐ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☒ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Jokowi-Ahok Setujui Dua Ruas Tol	- Dua ruas tol yang disetujui adalah tol Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang	2013				

Jokowi-Ahok Setujui Dua Ruas Tol

Persetujuan Jokowi dan Ahok dinilai menciderai rakyat kecil.

JAKARTA — Ketidakpastian rencana pembangunan enam ruas tol di Jakarta akhirnya menemui titik terang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil keputusan menyetujui dua dari enam ruas tol yang diusulkan itu.

"Jadi intinya kami bukan antijalan tol seperti yang pernah kami bilang saat kampanye. Minimal dua ruas jalan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kemarin. Dua ruas tol yang disetujui adalah tol Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang.

Ahok mengatakan kedua ruas ini harus direalisasi untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas dari Pelabuhan Tanjung Priok. Diperkirakan arus lalu lintas dari Tanjung Priok akan meningkat seiring dengan adanya rencana penambahan pelabuhan baru. Ahok menegaskan, dua ruas tol yang disetujui ini harus didesain ulang dengan masuk ke kawasan Tanjung Priok.

"Jika tidak seperti ini (dua ruas disetujui), bisa dibayangkan truk-truk dengan kontainer begitu besar keluar-masuk Priok dan harus masuk ke kota," kata Ahok.

Gubernur DKI Joko Widodo menegaskan kembali pentingnya dua ruas jalan tol dari enam ruas yang

diajukan oleh PT Jakarta Tollroad Development. Menurut dia, kedua ruas tersebut bisa mempermudah distribusi logistik di Jakarta Utara. "Tadi dibicarakan dari Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang paling enggak bisa memperlancar distribusi logistik dari dalam kota ke luar Jakarta. Jadi terbantu oleh ruas jalan tol itu," katanya.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mengatakan persetujuan dua ruas tol itu menunjukkan Jokowi-Ahok tidak prorakyat kecil. "Saat pertemuan tertutup minggu lalu, Jokowi mengatakan tetap menolak karena ruas JORR W2 yang lewat Tanjung Priok akan selesai 3,5 tahun. Itu dia sendiri yang bilang,"

katanya kepada *Detik*.

Jadi, kata dia, lebih baik ia menunggu penyelesaian ruas JORR W2 daripada membangun ruas jalan tol baru. "Lo, ini kenapa berubah. Saya juga heran, tapi kami tetap enggak akan setuju," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan Jokowi-Ahok semestinya menyetujui pembangunan enam ruas tol itu. Sebab, katanya, pembangunan enam ruas tol itu sudah memiliki payung hukum berupa peraturan daerah. "Proyek itu sudah disetujui sejak zaman Bang Yos. Semestinya kita berkaca pada peraturan yang ada," katanya.

TIA AGNES



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☒ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Bandara Soekarno Hatta Sudah Sesak	<div><div>-</div><div>Pertumbuhan bisnis penerbangan Indonesia mestinya harus didukung Bandar udara yang memadai</div><div>-</div><div>Optimalisasi landasan pacu akan mendongkrak kemampuan pelayanan sisi udarasisi udara dari 52 pergerakan per jam di 72 pergerakan per jam</div><div>-</div><div>Untuk meningkatkan kapasitas parkir dari 125 pesawat menjadi 174 pesawat, Angkasa Pura II siap membangun pelataran pesawat (apron) tambahan</div></div>			Rp. 4,8 miliar		

PERHUBUNGAN

Bandara Soekarno-Hatta Sudah Sesak

JAKARTA. Pertumbuhan bisnis penerbangan Indonesia mestinya harus didukung bandar udara yang memadai. Ini pula yang belum tercermin di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Ignatius Bambang Tjahjono, Direktur Kebandarudaraan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Senin (4/2), pengembangan Bandara Soekarno-Hatta sudah mendesak

Saat ini, pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) rata-rata sebanyak 52 kali per jam. Padahal, kapasitas bandara saat ini, idealnya hanya sebanyak 45 pergerakan saja. Makanya, pengembangan Bandara Soetta merupakan langkah yang paling mendesak untuk mengatasi kepadatan tersebut.

Untuk meluncurkan rencana itu, operator Bandara Soetta, PT Angkasa Pura II, harus mengoptimalkan dua landasan pacu (*runway*) dan membangun tiga bangunan terminal penumpang untuk meningkatkan kapasitas, baik pergerakan pesawat maupun penumpang.

"Optimalisasi landasan pacu akan mendongkrak kemampuan pelayanan sisi udara dari 52 pergerakan per jam menjadi 72 pergerakan per jam," imbuh Direktur Utama AP II, Tri S Sunoko.

Untuk meningkatkan kapasitas parkir dari 125 pesawat menjadi 174 pesawat, Angkasa Pura II siap membangun pelataran pesawat (*apron*) tambahan.

Pengelola juga akan mele-

barkan akses jalan utama P1 dan P2, kemudian memperluas apron dan membuat *high speed rapid exit taxiway* untuk meningkatkan kapasitas pergerakan pesawat, menambah kapasitas *boarding lounge* di Terminal 1 dan Terminal 2, serta meningkatkan kapasitas parkir kendaraan pengantar dan penjemput di Terminal 1 dan Terminal 2.

Sepanjang tahun 2011, total pergerakan pesawat di Ban-

Setelah dikembangkan, Bandara Soetta menampung 62 juta penumpang per tahun.

udara Soetta mencapai 358.000, baik itu untuk pergerakan *take-off* dan *landing*.

"Kapasitas pelayanan hingga 623.420 pergerakan per tahun akan dicapai jika Soekarno-Hatta memiliki tiga *runway* dan hal tersebut akan bisa mengantisipasi pertumbuhan setidaknya hingga 2030," ungkap Tri Sunoko.

Pengembangan Bandara Soetta membutuhkan dana hingga Rp 4,8 triliun. Proyek ini akan meningkatkan kapasitas daya tampung bandara ini menjadi 62 juta penumpang pada 2014. Saat ini kemampuan bandara hanya 22 juta penumpang per tahun.

Ragil Nugroho



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☒ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Perbaikan Jalan dan Jembatan Rp. 226,76M	<div>- Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp.226,76 miliar untuk perbaikan empat ruas jalan dan delapan jembatan melalui APBD 2013</div> <div>- Proyek kegiatan jalan dan jembaran nantinya akan melalui lelang dan tender di LPSE Provinsi Banten. Setelah selesai lelang dan telah ada pemenangnya maka kegiatan dapat dimulai dan dikerjakan</div>	2013				

Perbaikan Jalan dan Jembatan Rp226,76 M

SERANG - Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp226,76 miliar untuk perbaikan empat ruas jalan dan delapan jembatan melalui APBD 2013. Untuk perbaikan empat ruas jalan sebesar Rp179,96 miliar, sementara delapan jembatan dialokasikan Rp46,80 miliar.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten Muchtar Sutanto mengatakan, alokasi anggaran Rp179,96 miliar diperuntukkan bagi empat ruas jalan sepanjang 22 kilometer, yaitu Cisoka Maja-Tigarakasa, Kabupaten Tangerang; ruas jalan Saketi-Simpang Malingping, Kabupaten Pandeglang; Pakupatan- Palima, Kota Serang; dan Palma-Pasar Teneng di Kabupaten Serang.

Untuk delapan jembatan dengan alokasi anggaran Rp46,80 miliar. "Pada akhir Maret atau awal April se-

muanya dapat dimulai, sehingga program dan kegiatan di DBMTR berjalan sesuai dengan harapan," kata Muchtar kemarin.

Proyek kegiatan jalan dan jembatan nantinya akan melalui lelang dan tender di LPSE Provinsi Banten. "Proses lelang dan tendernya nanti dilakukan di LPSE. Setelah selesai lelang dan telah ada pemenangnya maka kegiatan dapat dimulai dan dikerjakan," ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Banten SM Hartono meminta proyek perbaikan jalan dan jembatan diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat. Tidak hanya itu, Hartono juga meminta agar kualitas jalan dan jadwal penyelesaian pelaksanaan sesuai dengan harapan. "Kami minta agar pengerjaan jalan mengindahkan ketentuan kualitas jalan, sehingga umurnya lama," terangnya.

● teguh mahardika



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:



POSITIF (+)



NETRAL



NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☒ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
DKI Fokus Dua Tol Dalam Kota	<div><div>- Kedua ruas jalan tol yang akan di prioritaskan tersebut yakni, Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang. Dua ruas itu merupakan akses ke Pelabuhan Tanjung Priok.</div><div>- Kehadiran pelabuhan ini nantinya akan membuat arus transportasi darat, terutama untuk kendaraan jenis truk dan container lebih meningkat</div></div>			Rp. 7,37 triliun	PT. Jakarta Tollroad Development (PT. JTD)	

DKI Fokus Dua Tol Dalam Kota

JAKARTA – Polemik rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota mulai mendapatkan titik terang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memfokuskan pada pembangunan dua ruas tol karena sangat berdampak terhadap kelancaran perekonomian di Ibu Kota.

Kedua ruas jalan tol yang diprioritaskan tersebut, yakni Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang. Dua ruas itu merupakan akses ke Pelabuhan Tanjung Priok. Truk dan container dari Tangerang dan Bekasi tujuan Tanjung Priok yang membawa logistik tidak lagi terjebak macet.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Pemprov DKI Jakarta sebetulnya bukan antipati terhadap kehadiran jalan tol. Akan tetapi, kini Pelabuhan Tanjung Priok dalam tahap pengembangan dengan pembangunan New Tanjung Priok Port di Kalibara, Jakarta Utara.

Kehadiran pelabuhan ini nantinya akan membuat arus transportasi darat, terutama untuk kendaraan jenis truk dan container lebih meningkat. Untuk itu, pertumbuhan ini harus didukung infrastruktur jalan yang lebih memadai. Bila tidak, angkutan barang jenis truk dan container bisa melintas di dalam kota.

"Bisa dibayangkan kalau tidak ada jalan tol, truk dan container berseliweran di tengah kota. Solusinya harus ada dua jalan tol ini sebagai akses bagi

angkutan logistik itu," ujar Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI kemarin.

Kendati menyetujui dua ruas jalan tol, Basuki mengingatkan para kontraktor merancang ulang. Seperti pada ruas dari Semanan, nantinya harus masuk ke Tanjung Priok. Begitu juga dari arah Pulogebang, pun harus masuk ke New Tanjung Priok.



BASUKI PURNAMA

Tujuan pengubahan rancangan tersebut untuk mempermudah pengangkutan barang ke arah Sumatera, Jawa Barat, dan Jawa Tengah melalui jalan darat. Di dalam rancangan itu, nantinya juga harus diperhatikan tol ini harus dimanfaatkan angkutan massal.

Jika pun kendaraan pribadi masuk ke dalam tol ini, jalan itu tidak memiliki pintu keluar-masuk yang banyak. Lalu lintas kendaraan pribadi dia tur dengan tidak membuat pintu keluar dan pintu masuk setiap kilometer, tetapi minimal pada

jarak enam hingga tujuh kilometer.

"Keberadaan jalan ini hanya dapat di akses oleh kendaraan dengan jarak perjalanan panjang," tegas mantan bupati Belitung Timur tersebut.

Rencananya, pembangunan dua ruas jalan tol ini dikerjakan oleh PT Jakarta Tollroad Development (PT JTD). Perusahaan itu berkolaborasi dengan sejumlah BUMD dan BUMN menjadi investor pembangunan jalan tol. Pada mulanya, estimasi investasi pembangunan enam ruas jalan tol ini mencapai Rp42 triliun dan diperkirakan tuntas tahun 2022.

Pembangunan di dua ruas jalan tol, Semanan-Sunter sepanjang 20,23 km dan Sunter-Pulogebang dengan panjang 9,44 km membutuhkan anggaran sekitar Rp7,37 triliun.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Agus Pambagio mengatakan, selama ini publik Jakarta percaya kepada Jokowi-Basuki mampu membenahi Jakarta menjadi lebih baik, terutama untuk mengatasi terhadap persoalan kemacetan. Bila enam ruas jalan tol itu tetap di komodasi oleh Jokowi-Basuki, hal tersebut akan melukai hati masyarakat. "Masyarakat merasa kecewa dan tidak mendapatkan kepala daem yang pro rakyat," ujar Agus.

Upaya untuk mengantisipasi kemacetan yang semakin parah, maka pembenahan angkutan massal menjadi prioritas. Hingga kini belum ada angkutan umum yang representatif.

● ilham safetra